

NAMA : Dela Novita

NPM : 2313031023

KELAS : A

(UAS EKONOMI PENDIDIKAN)

SOAL 1 EFISIENSI ANGGARAN PENDIDIKAN

1. Analisis penggunaan anggaran pendidikan berdasarkan efisiensi internal dan eksternal

Berdasarkan konsep **efisiensi internal**, penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten A belum sepenuhnya efektif. Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang besar untuk membangun gedung sekolah baru sehingga angka partisipasi sekolah meningkat, peningkatan kualitas pendidikan belum terlihat. Hal ini disebabkan karena anggaran lebih banyak difokuskan pada pembangunan fisik, sementara peningkatan kompetensi guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan media pembelajaran masih kurang mendapat perhatian. Akibatnya, proses pembelajaran belum mampu menghasilkan peningkatan hasil belajar siswa secara signifikan.

Dari sisi efisiensi eksternal, kebijakan tersebut juga belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pendidikan seharusnya menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat mendukung pembangunan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, karena kualitas hasil belajar belum meningkat, manfaat pendidikan bagi dunia kerja dan pembangunan sumber daya manusia juga belum maksimal.

2. Dampak terhadap kualitas sumber daya manusia dan rekomendasi kebijakan

Kebijakan yang lebih menitikberatkan pada pembangunan gedung sekolah dapat meningkatkan akses pendidikan, tetapi tidak secara langsung meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jika kualitas pembelajaran rendah, maka siswa akan memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan mengurangi daya saing daerah.

Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah menyeimbangkan penggunaan anggaran antara pembangunan sarana fisik dan peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah perlu memperbanyak pelatihan guru, memperbarui kurikulum sesuai kebutuhan zaman, menyediakan media pembelajaran berbasis teknologi, serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas penggunaan anggaran pendidikan.

SOAL 2 KETIMPANGAN AKSES PENDIDIKAN

1. Bentuk ketimpangan pendidikan pada kasus tersebut

Kasus tersebut menunjukkan adanya ketimpangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekolah di perkotaan memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti laboratorium, akses internet, dan guru yang berkualitas. Sebaliknya, sekolah di pedesaan masih menghadapi keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, dan minimnya akses teknologi. Perbedaan tersebut menyebabkan kesempatan belajar yang diterima siswa tidak sama sehingga menghasilkan perbedaan prestasi akademik.

2. Dampak ekonomi jangka panjang dan solusi kebijakan

Ketimpangan pendidikan dapat menimbulkan berbagai dampak ekonomi jangka panjang. Siswa yang memperoleh pendidikan berkualitas rendah akan memiliki keterampilan yang lebih rendah ketika memasuki dunia kerja. Akibatnya, produktivitas tenaga kerja di daerah pedesaan menjadi rendah dan kesempatan memperoleh pekerjaan yang baik semakin terbatas. Kondisi ini dapat memperlebar kesenjangan pendapatan antara masyarakat kota dan desa serta menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.

Untuk mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah perlu melakukan pemerataan fasilitas pendidikan, meningkatkan akses internet di daerah terpencil, menyediakan insentif bagi guru yang mengajar di daerah pedesaan, serta memperluas program bantuan pendidikan dan teknologi bagi sekolah yang masih tertinggal.

SOAL 3 PENGANGGURAN TERDIDIK

1. Analisis penyebab pengangguran terdidik berdasarkan teori human capital

Menurut teori human capital, pendidikan merupakan investasi yang bertujuan meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan produktivitas seseorang. Namun, pada kasus ini peningkatan jumlah lulusan perguruan tinggi tidak diikuti dengan peningkatan kesempatan kerja yang sesuai. Banyak lulusan menganggur karena kompetensi yang dimiliki belum sesuai dengan kebutuhan dunia industri.

Kondisi ini terjadi karena kurikulum yang digunakan belum sepenuhnya mengikuti perkembangan pasar kerja, kurangnya pengalaman praktik selama masa pendidikan, serta rendahnya penguasaan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan seperti kemampuan teknologi, komunikasi, dan pemecahan masalah.

2. Hubungan pendidikan dan pasar kerja serta rekomendasi

Pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan pasar kerja karena pendidikan berfungsi menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Ketika kompetensi lulusan tidak sesuai dengan kebutuhan industri, maka terjadi ketidaksesuaian atau mismatch antara dunia pendidikan dan pasar kerja. Akibatnya, lulusan sulit memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang studinya.

Untuk meningkatkan relevansi lulusan, perguruan tinggi perlu memperkuat kerja sama dengan dunia usaha dan industri, memperbanyak program magang, mengembangkan

kurikulum berbasis kompetensi, serta meningkatkan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan dunia kerja dan kewirausahaan.

SOAL 4 KENAIKAN BIAYA PENDIDIKAN

1. Analisis berdasarkan konsep pendidikan sebagai barang publik dan barang privat

Pendidikan dapat dipandang sebagai barang publik karena manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh individu yang memperoleh pendidikan, tetapi juga oleh masyarakat secara keseluruhan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, pendidikan juga merupakan barang privat karena individu yang menempuh pendidikan akan memperoleh manfaat langsung berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan peluang kerja.

Kenaikan biaya kuliah yang dilakukan universitas bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Namun, kebijakan tersebut dapat membatasi akses pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga berpenghasilan rendah sehingga manfaat pendidikan tidak dapat dinikmati secara merata.

2. Dampak sosial ekonomi dari kenaikan biaya pendidikan

Secara sosial, kenaikan biaya pendidikan dapat menyebabkan berkurangnya kesempatan masyarakat kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Hal ini berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial dan mengurangi mobilitas sosial masyarakat.

Secara ekonomi, biaya pendidikan yang semakin tinggi dapat menambah beban pengeluaran keluarga. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengurangi jumlah masyarakat yang mengenyam pendidikan tinggi sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi kurang optimal.

3. Perlukah pemerintah melakukan intervensi?

Pemerintah perlu melakukan intervensi karena pendidikan merupakan sektor yang sangat penting bagi pembangunan nasional. Intervensi dapat dilakukan melalui pemberian beasiswa, bantuan biaya pendidikan, subsidi pendidikan tinggi, serta pengawasan terhadap kebijakan kenaikan biaya kuliah agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Dengan demikian, kualitas pendidikan dapat meningkat tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.

SOAL 5 DIGITALISASI PEMBELAJARAN

1. Analisis menggunakan konsep biaya pendidikan dan opportunity cost

Digitalisasi pembelajaran menyebabkan siswa membutuhkan perangkat elektronik dan akses internet untuk mengikuti kegiatan belajar. Bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, kebutuhan tersebut menjadi biaya tambahan yang cukup besar.

Dalam konsep opportunity cost, uang yang digunakan untuk membeli perangkat dan kuota internet berarti mengurangi kesempatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan lain yang juga penting, seperti kebutuhan pangan, kesehatan, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Oleh karena itu, sebagian siswa mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran secara optimal.

2. Dampak kesenjangan digital terhadap kualitas pendidikan dan solusi

Kesenjangan digital menyebabkan tidak semua siswa memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pembelajaran. Siswa yang memiliki perangkat dan internet yang memadai dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sedangkan siswa dari keluarga kurang mampu cenderung tertinggal. Akibatnya, kualitas pendidikan menjadi tidak merata dan kesenjangan hasil belajar semakin besar.

Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah perlu menyediakan bantuan perangkat belajar bagi siswa kurang mampu, memberikan subsidi kuota internet, memperluas pembangunan jaringan internet hingga daerah terpencil, serta menyediakan pusat layanan belajar digital yang dapat diakses oleh seluruh siswa. Dengan kebijakan tersebut, seluruh peserta didik dapat memperoleh kesempatan belajar yang lebih adil dan merata.